

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Sumber Lain

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23-31.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI
- Nugroho, P. (2020). Komunikasi Pemerintah Dalam Penyuluhan Perpajakan (Studi Kasus pada Program Business Development Services (BDS) di KPP Pratama Surakarta Tahun 2018-2019). Universitas Gadjah Mada.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Info Singkat*, 19-24.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tana, A. A. (2020). Tinjauan Pengaruh Pelaksanaan Program Business Development Services Terhadap Kepatuhan Pelaporan dan Penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Makassar Selatan. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Viviana, C. T. (2020). Tinjauan Atas Program Business Development Services (BDS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Wardani, D.K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 33-54.

### 2. Dokumen Publik dan Peraturan Perundang Undangan

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Services (BDS). Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara.